

Pengembangan Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Sampang

Development of Monitoring and Evaluation System for Capacity Building of Sampang Government

Anwar¹

Staff Pengajar Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

ABSTRACT

Larger authority embodied by Sampang regency has brought about the necessity of Sampang Development of Monitoring and Evaluation System for government Capacity Building. Institutional performance which reflect institutional capacity should be comprehensively developed in order to give relevant data and information of SKPD or institutional port folio and program performance. "Blue print" institutional performance which can be applied in the long run period and develop a given Monitoring and Evaluation System for government Capacity Building will be valuable information for government stakeholders.

Keywords: Monitoring and Evaluation System, Institutional performance.

ABSTRAK

Pemilihan strategi, lingkup, dan program pengembangan kapasitas akan ditentukan dari proses analisis *leading issues* dan *leading sector* sasaran, serta tantangan organisasi. Pengembangan sebuah indikator kinerja lembaga yang komprehensif dapat dipandang sebagai cermin hasil akhir kapasitas lembaga dalam menjalankan peran dan fungsinya, namun lebih penting dari itu merupakan awal dari proses perbaikan kapasitas manakala *monitoring* dan evaluasi merupakan bagian strategis dari pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan daerah. Dengan pengembangan indikator kinerja serta sejumlah prosedur dan mekanisme pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi diharapkan akan dicapai suatu proses pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Kata kunci : pengembangan kapasitas kelembagaan, sistem monitoring dan evaluasi.

Degradasi kualitas birokrasi dalam menanggapi gejala domestik dan global yang tidak cukup memadai telah membawa babak baru reformasi di Indonesia tahun 1998-an. Birokrasi Indonesia yang sejak orde baru memiliki daya immunitas yang tinggi atas gejala dan dinamika domestik tapi cenderung lebih rentan terhadap gejala global menandakan kapabilitas penyesuaian dan kapasitas birokrasi untuk mereformasi sendiri sangat rendah. Sejumlah tuntutan dari beberapa daerah di Indonesia agar proses pembangunan menjadi lebih terdesentralisasi dan merata menghasilkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengandung dimensi desentralisasi yang lebih besar merupakan respon yang cukup proporsional.

¹Alamat Korespondensi : Prodi Administrasi Publik, FISIP, Univ. Jember. Jl. Kalimantan (Kampus Tegal Boto) Jember 68121. Telp: (0331) 335586. e-mail: Ustadanwar@gmail.com